

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- A. Wiyana G.H Perdanaharja, *Materi Acuan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Seri Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Kementrian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Perikanan, departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan Coastal Resources Management Project, (Jakarta: 2005)
- Abdul Rahman dan Dewi Purnama, *Studi Komunitas Ekosistem Terumbu Karang di Pulau Tikus*, (Laporan Penelitian Pembinaan, 2011)
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, *Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kemaritiman Provinsi Bengkulu tahun 2017*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Provinsi Bengkulu dalam Angka 2017*
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, *Laporan Pencadangan Kawasan Konservasi Pulau Tikus Kota Bengkulu*, (PT. Cipta Wahana Konsultan, 2017)

- Deddy Bakhtiar, dkk, *Kajian Karakteristik Ekosistem Perairan Pulau Tikus Kota Bengkulu Dalam Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Secara Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*, (Laporan Akhir Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi BOPT, Universitas Bengkulu, 2013)
- D.G.R Wiadnya, *Tahapan Menuju Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia*, (Focus Group Discussion, DKP Pasuruan, FPIK UB MALANG, 2011)
- Giyanto, *Kondisi Terumbu Karang di Perairan Sisi Timur Pulau Tikus Bengkulu*, (Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, 2017)
- H.A.W Widjaja, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008)
- H.A.W Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2016)
- Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Kerjasama Departemen Kelautan dan Perikanan Dengan Kelompok Kerja Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil*, (Bappenas, 2003)

- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, (Malang: Setara Press, 2012)
- Nybakken, *Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992)
- R. Dauhari, *Model Pembangunan Ekosistem Pulau-Pulau Kecil Secara Optimal dan Berkelanjutan – Studi Kasus Pulau Siberut*, (Majalah Alami, Vol 3, Nomor 1, DIT, 1998)
- Rahardjo A, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Rahmawaty, *Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Kelautan*, (Medan: 2004), Tesis USU, Fakultas Kelautan dan Perikanan
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bengkulu, 2013-2018
- Rokhimin Dahuri, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta: PT. Pratnya Pratama, 2001)
- Robert M. Delinom, *Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2007)
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2014)

Supriyadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar
frafika, 2011)

Yulianto, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal
Soedirman, 2011)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 Pengganti Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pengganti Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Jurnal-Jurnal

Abdul Rahman Singkam, *Komunitas Ikan Krang di Perairan Pulau Tikus Bengkulu*, (Prodi Pendidikan Biologi JPMIPA FKIP Universitas Bengkulu), Jurnal Gradien Vol. 8, No. 2, Juli 2012

Diah Irawati Dwi Arini, *Potensi terumbu karang Indonesia “Tantangan dan Upaya Konservasinya”*, (Balai Penelitian Kehutanan Manado, Info BPK Manado, Vol. 3, No. 2, 2013)

Okta Pradita Kusuma Putra, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengelolaan Hasil Perikanan di Kabupaten Pati”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017

Syamsul Arifin, *Peran dan Fungsi Hukum Lingkungan Mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim Pada Sumber Daya Pesisir Sumatera Utara*, (Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol.10, No.2, Juli-Desember 2015)

Website

<https://ksmtour.com/informasi/tempat-wisata/bengkulu/pulau-tikus-kemolekan-pulau-kecil-bengkulu.html>, diakses pada tanggal 24 September 2018